

Pontianak Post • Selasa 7 Agustus 2012

Eks Pengungsi Sambangi BPK

PONTIANAK- Untuk kedua kalinya eks pengungsi kerusuhan sosial tahun 1999 didampingi LSM Laskar Anti Korupsi (LAKI) mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Wilayah Kalimantan Barat. Mereka mendesak BPK agar segera melakukan audit terhadap dugaan korupsi penyelewengan dana bantuan bagi eks pengungsi kerusuhan sosial. Bahkan LAKI mengancam akan aksi yang lebih besar dengan mengerahkan ribuan pengungsi meminta agar BPK Wilayah Kalimantan Barat dibubarkan.

"Kasus ini sudah sepuluh tahun, tapi sama sekali tidak pernah tuntas bahkan belum jelas status hukumnya

sehingga kemana lagi eks pengungsi ini akan mengadu jika tidak ke BPK," ujar Burhanuddin Abdullah, Ketua DPP LAKI Kalimantan Barat. Dia menegaskan jika persoalan pengungsi hingga saat ini belum tertuntaskan. Padahal kasus tersebut berlangsung 10 tahun silam. Namun hingga saat ini belum ada kepastian hukumnya.

Burhan menjelaskan para pengungsi eks kerusuhan sosial hanya meminta agar BPK RI wilayah Kalbar terus memeriksa keuangan yang telah dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar sebab hingga saat ini para pengungsi belum juga mendapatkan hak-hak mereka seperti yang telah dijanjikan pemerintah daerah.

"Jatah hidup (jadup) bagi pengungsi yang dialokasikan untuk sembilan bulan ternyata juga hanya diterima tiga bulanjadup itu meliputi uang lauk-pauk senilai seribu lima ratus rupiah dan empat ons beras per orang per hari," ungkapnya.

Selain itu, sambung Burhan, adapula dana pemberdayaan yang dialokasikan lima juta rupiah per keluarga yang ternyata hanya disalurkan kepada sebagian pengungsi atau enam ribu keluarga.

"Hingga saat ini persoalan bantuan bagi pengungsi terus dibiarkan berlarut-larut sejak tahun 1999 sementara kondisi eks pengungsi kerusuhan sosial saat ini sangat memprihatinkan," pungkask dia. (ars)